



**Judul** : Alokasi Infrastruktur Tetap : DPR Menyetujui Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017  
**Tanggal** : Jumat, 28 Juli 2017  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 20

# Alokasi Infrastruktur Tetap

## DPR Menyetujui Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan DPR menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017. Revisi mengakomodasi sejumlah perubahan tanpa mengurangi anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberantasan kemiskinan.

DPR memberikan persetujuan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 pada Sidang Paripurna di Jakarta, Kamis (27/7). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto.

Menri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pendapat akhir pemerintah menyatakan, tantangan pembangunan Indonesia menuntut pemerintah untuk menjalankan APBN yang bisa memenuhi belanja produktif. Belanja produktif itu antara lain untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, program perlindungan sosial, serta peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara.

Pemerintah akan terus mengelola utang secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai standar pengelolaan yang diamanatkan oleh negara-negara di dunia. Utang akan digunakan untuk investasi yang produktif.

Penjelasan soal utang disebut Sri Mulyani secara eksplisit pada pendapat akhir pemerintah menyul maraknya tanggapan terhadap pelebaran defisit APBN yang berarti membengkaknya utang. Tanggapan ini dilontarkan di berbagai forum. Defisit APBN Perubahan adalah Rp 397,24 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dibandingkan APBN 2017, defisit membengkak Rp 67,07 triliun.

Hal ini terjadi karena target pendapatan negara dikoreksi turun Rp 14,22 triliun, dari Rp 1.750,28 triliun menjadi Rp 1.736,06 triliun. Sementara be-

lanja negara bertambah Rp 52,85 triliun, dari Rp 2.080,45 triliun menjadi Rp 2.133,3 triliun.

Target penerimaan perpajakan turun Rp 26,16 triliun menjadi Rp 1.472,71 triliun. Adapun penerimaan negara bukan pajak naik Rp 10,2 triliun menjadi Rp 260,24 triliun dan penerimaan hibah naik Rp 1,74 triliun menjadi Rp 3,11 triliun.

Adapun anggaran belanja pemerintah pusat naik Rp 51,43 triliun menjadi Rp 1.366,96 triliun. Sementara transfer daerah dan dana desa naik Rp 1,41 triliun menjadi Rp 766,34 triliun.

### Stabilitas ekonomi

Sri Mulyani masih dalam pendapat akhir pemerintah, mengatakan, tingkat utang akan terus dijaga agar tidak mengancam stabilitas perekonomian dan tidak menjadi beban yang tidak dapat dipenuhi. Pengelolaan utang, baik dari sisi waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo, maupun pengendalian kas pemerintah, akan terus dijaga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

"Tidak saja untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah telah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan dijaga keberlanjutannya," kata Andreas.

Sementara itu, pada sidang paripurna yang sama, DPR juga menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ditetapkan menjadi undang-undang.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Eddy Suryo, berpendapat, sejumlah alokasi anggaran belanja perlu pe-



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyapa sejumlah anggota DPR seusai memberikan pandangan mewakili pemerintah pada Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7). Pada sidang paripurna tersebut, DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perpajakan untuk disahkan menjadi undang-undang. DPR juga menyetujui pengesahan pertanggungjawaban UU APBN 2016 dan APBN Perubahan 2016.

najaman dalam implementasinya. Di antaranya adalah realokasi investasi kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi dana berulir PIP. Nilainya mencapai Rp 1,5 triliun.

"Ini adalah dana untuk usaha ultramikro. Kriteriaanya seperti apa dan bagaimana mekanisme penyularannya, ini yang harus dijelaskan secara transparan," kata Andreas.

Sementara itu, pada sidang paripurna yang sama, DPR juga menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ditetapkan menjadi undang-undang.

POSTUR APBN PERUBAHAN 2017			
	Rp	APBN	APBN Perubahan "Outlook"
<b>A Pendapatan negara</b>	<b>1.750,28</b>	<b>1.736,06</b>	<b>1.736,06</b>
I Penerimaan dalam negeri	1.748,91	1.732,95	1.732,95
1. Penerimaan perpajakan	1.498,87	1.472,70	1.472,70
2. Penerimaan negara bukan pajak	250,03	260,24	260,24
II Penerimaan hibah	1,37	3,10	3,10
<b>B Belanja negara</b>	<b>2.080,45</b>	<b>2.133,29</b>	<b>2.099,940</b>
I Belanja pemerintah pusat	1.315,52	1.366,95	1.343,07
II Transfer ke daerah dan dana desa	764,92	766,33	755,86
<b>C Keseimbangan primer</b>	<b>-108,97</b>	<b>-178,03</b>	<b>-144,30</b>
<b>D Surplus/(defisit) anggaran (A-B)</b>	<b>-330,16</b>	<b>-397,23</b>	<b>-362,88</b>
% Defisit anggaran terhadap PDB	-2,41%	-2,92%	-2,67%
<b>E Pembentukan simpanan (I+II+III+IV+V)</b>	<b>330,16</b>	<b>397,23</b>	<b>362,88</b>
I Pembentukan simpanan utang	384,69	461,34	426,98
II Pembentukan investasi	-47,48	-59,73	-59,73
III Pemberian pinjaman	-6,40	-3,66	-3,66
IV Kewajiban penjaminan	-0,92	-1,00	-1,00
V Pembentukan lainnya	0,30	0,30	0,30

(LAS) Sumber: Kementerian Keuangan

INFOGRAFIK: GUNAWAN